

PANCASILA: ISLAM BERKEBUDAYAAN

Wahid Imam Rifai

Dosen pada Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

wahidimamrifai@gmail.com

Abstrack

Indonesia is a country consisting of various Tribes, Religions, Races and Groups, it is not justified to favor one of them. Pancasila as the foundation of the state must be the unifying and unifying of all. The historic factor of Indonesia in forming the basis of the state is not short and trivial, then Pancasila as the crystallization of the long journey of the Nation must be maintained and maintained from the radical movement and division of unity. Islam is Pancasila and Pancasila is Islam. With the meaning that Islam is in the values of Pancasila that the founders of this State and the Nation aspired to. Islam is also not against the Pancasila, Precisely on the basis of Pancasila Islam can grow and full of noble value, so is the opposite. Islam with the teachings of tolerance is expected to be an important part in uniting and making the Indonesian nation stronger in facing all the challenges of the times. Islam is not a religion that destroys the noble culture of Indonesia, but Islam is a religion that maintains and develops Indonesian culture.

Keywords: Islam, Pancasila, Culture, Religion, Tolerance, Nusantara

Abstrak

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai Suku, Agama, Ras dan Kelompok, tidak dibenarkan untuk mendukung salah satu dari mereka. Pancasila sebagai fondasi negara harus menjadi pemersatu dan penyatuan semua. Faktor historis Indonesia dalam membentuk basis negara tidaklah pendek dan sepele, maka Pancasila sebagai kristalisasi perjalanan panjang Bangsa harus dijaga dan dipertahankan dari gerakan radikal dan pembagian persatuan. Islam adalah Pancasila dan Pancasila adalah Islam. Dengan makna bahwa Islam adalah nilai-nilai Pancasila yang para pendiri Negara dan Bangsa ini cita-citakan. Islam juga tidak melawan Pancasila, justru atas dasar Pancasila Islam bisa tumbuh dan penuh nilai luhur, begitu juga sebaliknya. Islam dengan ajaran toleransi diharapkan menjadi bagian penting dalam menyatukan dan membuat bangsa Indonesia semakin kuat dalam menghadapi semua tantangan zaman. Islam bukanlah agama yang menghancurkan budaya bangsawan Indonesia, tetapi Islam adalah agama yang memelihara dan mengembangkan budaya Indonesia.

Keywords: Islam, Pancasila, Budaya, Agama, Toleransi, Nusantara

Pendahuluan

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang kecil, yang merdeka sebab hadiah Jepang, akan tetapi kemerdekaan Indonesia adalah klimaks dari perjuangan panjang meneruskan keinginan luhur dari bangsa Indonesia yang dimulai dengan momentum gerakan Budi Utomo 1908, dan Sumpah Pemuda 1928. Bahkan ketika kita tarik mundur keinginan penyatuan Nusantara sebagai *Nation* sudah digelorkan oleh Gajah Mada pada pemerintahan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk (*Rajasa Negara*).

Hingga banyak kalangan pribumi Indonesia yang terlibat dalam pendidikan di luar negeri, baik dengan rekom pemerintahan Belanda ataupun dengan mandiri berangkat demi menimba pengetahuan, semangat meningkatkan harkat kehidupan dan pulang ke-Nusantara membawa arus besar untuk memerdekakan bangsanya. Soekarno-Hatta adalah contoh. Jauh kebelakang KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga juga alumni Timur Tengah dengan keinginan besar membangun bangsanya dan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912, Yogyakarta. KH. Hasyim Asyari 1926 mendirikan Nahdlatul Ulama sebab menyadari media perjuangan sebagai perwakilan golongan yang membutuhkan wadah dan legitimasi. Ini adalah bagian-bagian "kecil" organisasi -pada zaman itu- yang kemudian melaksanakan inisiasi bersama dan berperan atas kemerdekaan baik secara politik maupun keorganisasian.

Diluar itu tokoh-tokoh Nasionalisme era pra-kemerdekaan melakukan inisiasi untuk membangun sebuah bangsa, 1924 Tan Malaka menulis buku *Naar De Republic Indonesia* (Menuju Republik Indonesia) mengusung faham Komunisme, dan bahkan mengusulkan kepada Komintern untuk menjalin kerjasama dengan pan-islamisme¹. Tjokroaminoto, mencetuskan Sosialis Sejati, Soekarno dan para aktivis alumni sekolah Hindia Belanda mencetuskan; Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dalam majalah *Indonesia Moeda*.²

Pancasila, sebagai *State Philosophy* adalah suatu dasar yang mampu membangun jiwa dan membina rakyat lahir dan batin, sehingga menjadi satu bangsa yang berakhlak, kata orang sekarang yang dapat mengatur diri sendiri, tanpa setiap waktu harus ditindaki oleh aparat-aparat negara.³ Ini bermakna bahwa Pancasila adalah system yang menjadi kendali dan tata nilai bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dengan harapan internalisasi atas Pancasila akan menjadi sebuah ruh dalam kehidupan sehari-hari, pandangan hidup dan dasar dalam membuat perundang-undangan, tata nilai kehidupan dan norma bermasyarakat sehingga tetap berorientasi pada pengukuhan jati diri bangsa.

Pancasila yang hari ini sering kita ucapkan, ajarkan kepada anak-anak kita dan dengarkan dalam setiap upacara dan acara-acara tertentu, merupakan perjuangan panjang dan merupakan wujud akomodir dan dasar dari semua suku, agama, ras dan golongan. Pancasila bukan milik Islam, bukan pula milik Kristen, bukan milik orang Sunda, Melayu atau Jawa, tetapi Pancasila adalah milik bersama masyarakat Indonesia dan Pandangan Hidup serta ruh dari bangsa Indonesia yang harus dipegang teguh serta diperjuangkan sampai kapanpun.

¹ h. 6.

² *Ibid.* Hal. 7

³ M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Segarsy, 2014), h. 105

Gus Solah menyatakan bahwa Negara kita yang berasaskan Pancasila masih belum sempurna bila ditilik dan dilihat lebih dalam sebab masih banyak perwujudan dari *kelima* sila Pancasila masihlah belum sempurna.⁴

Sila-sila dalam Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa perjuangan dan pengetahuannya atas Indonesia. Mereka merumuskan dengan dasar persatuan dan kesatuan, dengan semangat persatuan dari seluruh kepulauan dan semangat persatuan bangsa dari Sabang hingga Merauke. Semangat membangun kebudayaan bersama dalam kerangka mewujudkan sebuah Bangsa yang maju.

Akhir-akhir ini terjadi upaya pemaknaan sempit atas Pancasila dan upaya menjadikan Pancasila bukan lagi sebagai satu-satunya dasar negara dari kelompok tertentu. Atau sebaliknya muncul klaim dari kelompok tertentu bahwa mereka yang paling "Pancasila". Bahkan menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, "Gema Pancasila sekarang ini semakin mengendur"⁵.

Kemudian muncul anggapan bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara dengan silanya tidaklah mencerminkan Islam bahkan cenderung sekuler, sedangkan penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim. Oleh sebab itu penulis akan menuliskan tinjauan historis tentang Pancasila adalah "Tepat", bukan sekuler.

Pancasila menjadi asing dan terasing di tanah kelahirannya, di bumi dimana Pancasila dikobarkan dan dibangun diatas ribuan nyawa yang memperjuangkannya, fenomena semacam ini sebab gerusan zaman dan berkembangnya ideology-ideologi dunia. Bahkan beberapa perundang-undangan mulai dibangun bukan lagi berdasarkan Pancasila.⁶

Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi juga bukan negara sekuler, yang sama sekali memisahkan agama dari negara. Akan tetapi Indonesia adalah negara demokrasi dengan dasar Pancasila. Upaya sekulerisasi dalam kehidupan bernegara mulai muncul, menggunakan isu-isu agama yang bertentangan dengan negara juga dilancarkan sebagai upaya memisahkan urusan dan tatanan kenegaraan dengan agama.

Indonesia dengan dasar Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, akan tetapi negara Demokrasi dengan azas Pancasila. Bukan negara yang menjadikan satu antara urusan agama dan urusan negara. Menukil bahasa Soekarno bahwa dasar negara kita adalah bukan Demokrasi ala Barat, bukan Pula Negara Agama namun Negara kita adalah Demokrasi Sejati yang menjiwai seluruh isi dari Nusantara dan diwujudkan dalam Pancasila dan UUD 45.

⁴ Salahudin Wahid, *Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2018), h. 7

⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 5

⁶ Ngainun Naim. "Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid". Dalam *Jurnal Episteme*, Vol 10. No 2, 2015, h. 436

Dalam kerangka memberikan paparan dan penegasan kembali bahwa Pancasila adalah layak dan “sempurna” sebagai dasar negara, dan menentang pemahaman bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila penulis membuat tulisan dengan judul “**Pancasila : Islam Berkebudayaan**”.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersumber beberapa buku, kajian sebelumnya berupa jurnal dan website yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Dengan batasan pemahaman pada sejarah Pancasila dan isi dari Sila “Ketuhanan yang Maha Esa” serta penghapusan 7 kata dalam sila pertama dalam “piagam Jakarta” dengan arah Pancasila : Islam Berkebudayaan.

Pancasila dalam Ideologi-Ideologi

Baru-baru ini Jokowi sebagai presiden membuat slogan “saya Indonesia, saya Pancasila” sebagai wujud kecintaan dan penyampaian meng-eratkan seluruh komponen Bangsa. Jokowi mengatakan Pancasila adalah jiwa dan raga bangsa Indonesia. “Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Perikat keutuhan bangsa dan negara,” ujar Jokowi dalam akun berbagi video miliknya yang diunggah hari ini, Senin (29/5/2017).⁷ Bahkan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional sebagai hari Pancasila.

Negara-negara Eropa dan Barat berkembang dua ideology besar, ada komunisme dan kapitalisme, pada penyusunan dasar ideology Pancasila beberapa negara sudah paten menetapkan ideology bangsanya. Seperti Uni Soviet pada zaman itu menetapkan bahwa dirinya berdiri atas ideology komunisme, meski harus tumbang sebab kediktatoran pemimpinya. US berdiri dengan kapitalisme dengan sifat ekspansivnya. Maka hal tersebut juga memiliki pengaruh besar atas penyusunan Pancasila sebagai ideology.

Pancasila dalam perkembangannya sebagai ideology Negara pada awal kemerdekaan bukanlah satu-satunya ideology yang diusung dan diusulkan, mulai dari Islam, Sosialis, Komunis dan Nasionalis. Akan tetapi akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara dan Ruh Negara dengan argument dan perjuangan dalam forum BPUPKI, PPKI dan Komisi 9 yang dalam kondisi terdesak dan mendesak.

Jika ideologi-ideologi nusantara ini dipaparkan dari awal nusantara maka akan banyak sekali, dari Majapahit hingga kemerdekaan. Maka penulis akan memaparkan ideology dengan batasan pada zaman munculnya ide kebangsaan 1908, saat lahirnya Budi Utomo, 20 Mei 1908.

⁷Rimadi, Lukman, Jokowi: Saya Indonesia Saya Pancasila dalam , <http://news.liputan6.com/read/2969876/>, diakses 29 Mei 2017, 17:01 WIB

Kristalisasi Faham Kenegaraan

Pecahnya perang dunia I, perang dunia II, gugurnya komunisme di Rusia merupakan bagian dari pemahaman atas dikukuhkannya Pancasila sebagai dasar negara, dengan alur dan pemahaman Nasionalisme. Dalam pusaran dunia dan telah mengalami penjajahan dari negara-negara Eropa dan Asia yang memiliki dasar negara berbeda-beda menjadikan tokoh-tokoh kemerdekaan memperdebatkan secara detail tentang dasar negara.

Disisi lain, Nusantara sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati pengaruh agama-agama local, sekitar 14 abad pengaruh *Hinduisme* dan *Budisme*, 7 abad pengaruh islam, dan 4 abad pengaruh Kristen.

Pada mula awal masyarakat Indonesia memiliki system penyembahan *Animisme dan Dinamisme*, dan melakukan penyembahan mulai dari barang yang besar dan tak kasat mata seperti ; petir, angin, dan laut (ratu kidul) sampai bergeser kepada penyembahan binatang dan “pemilik tumbuhan” ketika masyarakat Indonesia bergeser pemahaman untuk “mendomestikan” tumbuhan dan binatang.

Pada abad ketiga dan empat masehi mulai masuklah Hindu-Budha dari India, kemudian disusul Islam dari Timur Tengah, yang dibawa masuk oleh para pedagang dari pelbagai ras (Cina, Arab dan Gujarat). Bersamaan dengan Islam sebab beberapa pedagang juga dari Cina maka Indonesia dimasuki faham *Konghucu*, menyusul kemudian Kristen dari Eropa pada abad 16.

Dengan penyebaran agama dan kepercayaan itu, maka agama-agama - dalam bentuknya masing-masing- tersebut mempengaruhi dan terpengaruhi peradaban lain. Dan hal tersebut tidak serta merta menggantikan pemahaman lama, dan berakar di Indonesia. Maka sampai sekarangpun masih banyak faham dan kepercayaan asli Indonesia yang masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. *Sunda wiwitan, Cigugur, Buhun, Kejawen* masih bercokol dan memiliki peran keagamaan dalam masyarakat.⁸

Hal tersebut juga menjelaskan bahwa “Tuhan” telah banyak mempengaruhi dan berperan dalam keyakinan dan menata masyarakat Indonesia, sebab dari kesemua kepercayaan diatas telah memiliki system kepercayaan dan tata nilai yang wajib diikuti oleh penganutnya.

Pancasila merupakan kristalisasi dari pemikiran dan pengalaman tokoh-tokoh kemerdekaan. Mulai dari pengaruh Eropa baik yang bersifat dari dalam (penjajahan belanda) maupun dari luar (tata nilai yang difahami oleh alumni pendidikan belanda). Pada awalnya VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) (1602-1800) mencoba memisahkan peran agama yang sudah lama bercokol ditengah masyarakat. Dan sampai pada puncaknya abad ke-19 Belanda mencoba

⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 58.

melucuti peran agama dan sosia-politik kemasyarakatan.⁹ Sebab peranan agama memiliki peran dalam menciptakan nilai dan system, bahkan tak jarang pemberontakan atas pemerintahan belanda didalangi oleh para pemuka agama.

Dengan kejenuhan sebab semakin lamanya dan membabi butanya penindasan atas rakyat, baik dalam bentuk fisik, mental dan kebebasan serta munculnya beberapa putra terbaik bangsa mengenyam pendidikan serta terbukanya pemikiran maka inisiatif menyatukan diri dalam sebuah bangsa dan menyamakan pandangan muncul. 1908 Budi Utomo berdiri, sebagai tonggak awal adanya organisasi maju dengan system.²⁰ tahun kemudian 1928 beberapa perwakilan terbaik daerah menyatukan diri dalam sumpah pemuda. Sebelumnya beberapa organisasi maju bersifat kedaerahan dan berdasarkan suku dan keyakinan sudah mendahului membentuk dan membuat "wadah" perjuangan. Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Sarekat Islam (1912), Perhimpunan Indonesia (1924), Partai Sarikat Islam Indonesia (1929), Perkempalan Politik Katolik Indonesia (1923), Partai Kaum Masehi Indonesia (1930).

Budaya Indonesia yang "demokrasi-desi"

"*Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*". Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat. Itu ungkapan dalam masyarakat Minangkabau, dalam membuat kesepakatan untuk bersama. Demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat adalah hal baru, sebab Nusantara dikuasai oleh raja-raja autokrat yang memiliki kekuasaan absolut. Namun demikian aturan desa dan adat desa adalah institusi yang subur dan memiliki corak baik dalam mengembangkan demokrasi.

Tan Malaka, dalam pandangannya bahwa paham kedaulatan rakyat sudahlah membumi di Nusantara, misal dalam masyarakat Minangkabau, pada abad 14 sampai 15 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. "*Raja ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, Mufakat ber-raja pada alur dan patut*". Maka dalam budaya masyarakatnya akan mengacu pada nilai alur (Logika) dan Patut (keadilan).¹⁰

Menurut Hatta, meski dalam kungkungan feodalisme namun demokrasi dapat tumbuh subur di Nusantara sebab alat produksi utama adalah dimiliki secara bersama yaitu tanah. Bahwa kepemilikan atas tanah dilingkungan harus mendapatkan persetujuan lingkungan, sehingga kesepakatan bersama dan kepentingan bersama atas tanah akan menjadi masyarakat bersama memelihara, dan saling menghargai. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya budaya gotong royong dan urusan lainnya, seperti mendirikan rumah, dan merasakan kesibukan dan kesusahan masyarakat lain sehingga terbangunnya budaya *egaliter*. Hatta menambahkan anasir demokrasi desa adalah; rapat,

⁹Ibid, h. 60

¹⁰ Tan Malaka. *Merdeka 100 %*. 2005, h. 15-16.

mufakat, gotong royong, hak mengadakan “*protes*” bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.¹¹

Letak geografis Nusantara sebagai daerah kepulauan menjadikan Indonesia harus menerima segala budaya dengan asas kepercayaan dan tanpa kecurigaan untuk menerima pendatang dari mana saja. Artinya Nusantara secara kepribadian dan awal sejak adanya pembangunan dan koloni serta lebih maju institusiterendah -desa-sudah memiliki benih demokrasi, serta kultur yang akan menyuburkan demokrasi yang merupakan isi dari Pancasila.

Pengaruh Islam

Islam dan Pancasila -dengan ruhnya adalah demokrasi- apakah berkaitan? Beberapa uraian dan sejarahnya Islam mempengaruhi Pancasila. “Islam di Nusantara membawa Transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis”¹². Sedang menurut Hatta Islam adalah sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi social dikalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.¹³

Menurut Nurcholis Majid bahwa Islam menganut faham *tauhid* dan menuntut semua pengikutnya bahwa yang tidak memiliki tendensi kepada Tuhan adalah sama dan memiliki hak yang sama, dan menuntut keterbukaan dalam manajemen dan pengelolaan, menghendaki tatanan social yang terbuka, adil dan demokratis. Dan itulah yang dicontohkan nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dalam Islam, seorang nabi pun tidak bias memaksanak kehendaknya kepada ummat untuk memeluk islam, Nabi hanya menyampaikan dan menyeru kebaikan dan kebajikan. (Madjid. 1992. 3-4). Piagam Madinah adalah contoh demokratisasi pertama dalam sejarah Islam.

Islam yang mengajarkan persamaan hak, dan pandangan sama kepada setiap manusia adalah modal baik atas demokrasi. Islam memandang bahwa si kaya tidak bisa membaik dalam pencapaian akhiratnya kecuali dengan amal kebbaikanya, si pandai akan mempertanggung jawabkan dirinya dan kepandaiannya kepada Tuhanya tanpa campur tangan orang lain. Begitu juga pemimpin dan rakyatnya. Akan mempertanggung jawabkan segala amaliyahnya kepada Tuhanya masing-masing.

Ungkapan mendalam atas hubungan kepemimpinan dan rakyat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.*

¹¹ Yudi Latif, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Katualitas, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.389.

¹² Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi*, h. 265.

¹³ Op.Cit, h.. 389.

Dalam masyarakat melayu tercermin lewat bergesernya ungkapan “*melayu pantang membantah*” menjadi “*raja adil, raja disembah, raja zalim raja disanggah*”. Nilai egaliterianisme dalam islam ini yang mendorong berubah dan hilangnya sistem kasta di Nusantara.

Selain keragaman eksternal, keragaman internal dalam islam Nusantara sendiri menyulitkan terbentuknya representasi Islam yang monolitik serta memberi mekanisme bawaan bagi moderasi Islam. Dengan kondisi seperti itu terbuka lebar kemungkinan untuk mentransendensikan perbedaan-perbedaan itu, dan menempatkan pada batas toleransi yang memberi prakondisi bagi kesiapan bekerjasama lintas-kultural dalam suatu tatanan demokrasi.¹⁴

Dengan modal demokrasi desa dan Islam maka internalisasi Islam dalam kultur masyarakat Indonesia membentuk system yang demokratis menjadi sangat mendukung. Dengan keragaman dan kebudayaan asli Indonesia yang multikultur dan Islam yang cenderung terbuka terciptalah *egaliterianisme* yang baik. Ini benih munculnya demokrasi sejati.

Stimulus Barat

Penjajahan Belanda atas Nusantara, posisi strategis Nusantara serta budaya keterbukaan orang-orang Nusantara memberikan dampak atas perumusan dasar negara; Pancasila. Pengaruh barat atas demokrasi adalah pengaruh yang memberikan dorongan kematangan kondisi internal bangsa Nusantara untuk memantapkan nilai-nilai demokratis dalam sistem kenegaraan dan diwujudkan dalam demokrasi pancasila.

Masyarakat Eropa memiliki akar demokrasi yang panjang. Secara etimologis Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*cretien/kratos*” yang berarti pemerintahan. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah Athena, yang sering dirujuk sebab pemikiran-pemikiran filsafat politiknya dan sebagai awal percontohan demokrasi. Kemudian Roma yang sistem pemerintahannya adalah *republic*, berasal dari kata *res* yang berarti urusan dan *publicus* yang berarti milik rakyat umum.

Dari Athena dan Roma faham demokrasi “menular” ke beberapa negara tetangga dengan konsepsi dan pemahaman serta latar belakang kebangsaan masing-masing. Kemerosotan awal demokrasi dan berganti menjadi Otokrasi adalah saat jatuhnya Imperium Romawi, sekitar abad ke-V SM. Kemudian mulai muncul kembali pada era *Renaissance* pada abad ke 14-17 M. Hal tersebut juga distimulus oleh peradaban Islam.¹⁵

Revolusi Industri, membawa dampak pada munculnya kelas-kelas sosial baru dengan segala perangkatnya, membawa konflik antar kelas dan

¹⁴Yudi Latif, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Katualitas, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.394

¹⁵Yudi Latif, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Katualitas, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.396

mengarahkan konflik antar kelas, kelas borjuasi dengan kelas aristokrat, dari sinilah kemudian muncul konsep demokrasi baru dunia barat. Tonggaknya adalah *Declaration of Independence* Amerika Serikat (1776), kemudian Revolusi Perancis (1789) dengan slogan *Liberte, Egalite, dan Fraternite*. Dengan slogan ini rakyat Perancis menggulingkan kekuasaan tunggal raja yang ditopang kuat oleh kaum ningrat dan penghulu agama. Isu yang paling mencuat adalah pelucutan hak peran aristokrat dan penghulu agama dalam kehidupan agama dan bangsa.

Revolusi Perancis juga menghasilkan kelas baru, kaum borjuasi yang diuntungkan dengan revolusi ini, sedangkan dalam guliran industrialisasi juga menghasilkan kelas pekerja yang berhadapan langsung dengan kelas borjuasi dengan konfliknya. 1830 M munculah aliran baru Sosialisme. Dipelopori seorang Yahudi Jerman Karl Marx (1818-1883 M). Ini yang kemudian memberikan corak demokrasi sosialis.

Perkembangan Nasionalisme dan Demokrasi Barat bersama sistem kapitalistik, dengan sifat dasar *ekspansive*-nya-selain konflik internal dalam kapital itu sendiri-. Hal tersebut menuntut perluasan pengaruh, pasar dan sumber daya. Dan juga akan melahirkan konflik besar antar bangsa dan negara.

Terhitung Belanda-lah yang paling lama menjajah Indonesia, 3,5 abad. Hal tersebut membawa dua sisi dari koin peradaban barat. Imperialisme-Kapitalisme dan humanisme demokratis. Penindasan politik, penghisapan ekonomi oleh imperalisme dan kapitalisme yang bekerjasama dengan feodal, menumbuhkan sikap resistens dari rakyat. Menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme dikalangan para perintis kemerdekaan bangsa.

Kapitalisme menemukan sintesanya, munculnya Humanisme dan berujung kepada Sosialisme yang dicetuskan Karl Marx dan membawa pemahaman Liberal berdampak kepada parlemen Belanda. Adalah Jan Rudolf Thorbecke mengambil sikap cepat dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar (*grondwetsherziening*) dari konservatisme ke liberalisme. Hal ini berdampak pada negeri jajahan Belanda, sebab dengan perubahan tersebut merubah peranan negara jajahan yang awalnya sama sekali tidak diberikan hak politis diberikan hak politis.

Dewan Rakyat (*Volkstraad*) 1916 Adalah puncak dari liberalisasi perundang-undangan Hindia Belanda, konflik internal parlemen Belanda dan ketidak mampuan monitoring dengan penuh atas negeri jajahan mendorong anggota parlemen memberikan hak dan pendidikan keparlemenan kepada penduduk pribumi. Dewan Rakyat namanya. Beberapa orang Indonesia mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut. Prof. Dr. Soepomo adalah salah satunya, dan kemudian beliau adalah salah satu anggota yang ditunjuk untuk penguatan BPUPK.

Team Perumus Pancasila

“Dari semua negara-negara di Asia tenggara Indonesia adalah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya dari pada revolusi melawan penjajahan. Dalam alasan filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskan alasan-alasan secara mendalam dari pada revolusi-revolusi itu sendiri”¹⁶

Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, akan tetapi Pancasila juga merupakan pandangan hidup (*falsafah*) dalam melaksanakan tata nilai dan perundang-undangannya.

Jauh hari sejak 1908, dengan berdirinya Budi Utomo, konsep kenegaraan sudahlah dicetuskan bahkan disusul 20 tahun setelahnya dengan 1928, Sumpah Pemuda yang menyatakan “*bertanah air satu tanah air Indonesia, Berbangsa Satu bangsa Indonesia, Berbahasa Satu Bahasa Indonesia*”. Berbagai pemahaman dan latar belakang pendidikan dan kultur memunculkan *Nasionalisme* Indonesia untuk memerdekakan diri. Beberapa organisasi yang berdiri mulai menonjolkan dan memunculkan ideology dalam organisasi dan arah perjuangannya. Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Sarekat Islam (1912), Perhimpunan Indonesia (1924), Partai Sarikat Islam Indonesia (1929), Perkempalan Politik Katolik Indonesia (1923), Partai Kaum Masehi Indonesia (1930).¹⁷

Puncak dari tarik ulur organisasi-organisasi baik yang sifatnya pribumi, bentukan Jepang ataupun Belanda. Adalah tarik menarik antara Nasionalisme Barat dan Nasionalisme Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang berperan utuh atas perumusan Pancasila sebagai ideology dan *welstanchauung*. Berseteru dalam forum BPUPK dan PPK untuk menentukan dasar negara.

BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan)

Dokuritsu Junbii Chōsakai, adalah bentukan Jepang, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Koiso pada 7 September 1944, yang mengucapkan janji bahwa “Indonesia pasti akan “diberi” kemerdekaan pada masa depan”.

Keanggotaan BPUPK ini awalnya 63 orang, kemudian menjadi 69 orang. Jepang mencoba mengakomodir keanggotaan BPUPK berdasarkan lima golongan: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (*kooti*), pangreh (residen, wakil residen, bupati dan wali kota) dan golongan peranakan: Peranakan tionghoa 4 orang, Peranakan arab 1

¹⁶*ibid.* hal. 47

¹⁷*ibid.* hal 66

orang, dan 2 diantara anggota BPUPK adalah perempuan: Ny. Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito.¹⁸

BPUPKI, pada awal pendiriannya adalah untuk melakukan penyelidikan persiapan kemerdekaan, sedangkan pembahasan UUD dan dasar negara akan diserahkan kepada PPKI, namun selanjutnya dengan inisiatif maju dari para anggota BPUPKI maka agenda-agenda dimajukan dan diinisiasi untuk membahas UU dan Dasar Negara menjadi satu paket.

Jika diuraikan secara detail akan banyak tarik ulur soal dasar negara, kami akan memaparkan tarik ulur Nasionalisme Barat dan Nasionalisme Timur - mengutip apa yang diutarakan oleh Soekarno- yang diwakili oleh ; Soekarno dan Hatta, Radjiman Wediodiningrat dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, H. Agus Salim, KH. Abdul Wachid Hasyim.

BPUPK (*Dokurizu Zyunbi Koosakai*) dipimpin oleh Radjiman Widiodiningrat, dan wakilnya *Itibangase Yosio* berkebangsaan Jepang dan R.P Soeroso berkebangsaan Indonesia memimpin sidang pertama untuk membahas beberapa persiapan kemerdekaan, sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini Ketua meminta masing-masing anggota BPUPK menyampaikan pandangannya tentang dasar falsafah Indonesia merdeka, yang diatasnya akan dibangun “gedung “ bernama Negara Indonesia.

Dalam pandangan yang ada didalam sidang pertama ini bahwa sebelum mendirikan sebuah negara dan mengajak seluruh rakyat untuk bersatu didalamnya maka perlu adanya gambaran yang jelas akan keberlangsungan kemerdekaan dan menjamin seluruh warganya dalam kondisi merdeka, merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sidang pertama ini tiga orang perwakilan mendapatkan kesempatan menyampaikan pendapatnya yang mewakili dari anggota BPUPK:

1. Muhammad Yamin

Muhammad Yamin dilahirkan di Sawahlunto Sumatra Barat, 23 Agustus 1903. Ia adalah ketua ketua *Jong Sumatran*, saat penyatuan diri dan pernyataan Sumpah Pemuda. Mengenyam pendidikan dasar hingga keahlian. Mulai dari sekolah bumi putera hingga Sekolah Pertanian dan Rechthooschool (RHS). Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPK pertama dengan isi :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
- c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁸*ibid.* hal 9.

Ini adalah isi secara tertulis sedang dalam pidatonya M. Yamin menyatakan:

- a. Peri Kebangsaan
- b. Peri Kemanusiaan
- c. Peri ke-Tuhanan
- d. Peri Kerakyatan
- e. Kesejahteraan Rakyat

2. Soepomo

Prof. Mr. Dr. Soepomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) dan dalam pidatonya 31 Mei Soepomo menyatakan lima rumusan dasar negara:

- a. Persatuan
- b. Kekeluargaan
- c. Keseimbangan lahir dan batin
- d. Musyawarah
- e. Keadilan rakyat

Dengan penjelasan, *pertama* negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter atau integral. *Kedua* setiap warganya dianjurkan agar takhluk kepada Tuhan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. *Ketiga* dalam susunan pemerintah negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus menerus. *Keempat* sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong menolong, dan koperasi. *Kelima* negara berdasarkan semangat kekeluargaan Indonesia yang asli, yakni Asia Timur.

3. Ir. Soekarno

Soekarno mengambil peranan besar, dan menawarkan banyak opsi dalam perumusan Pancasila dan Demokrasi sebagai dasar negara, dalam pandangannya dalam merumuskan kemerdekaan ini dan dalam membangun kemerdekaan bersama, maka tidak perlu meniru demokrasi barat-demokrasi yang berkembang di Eropa- akan tetapi indonesia harus mendirikan demokrasi ala Indonesia yakni *Demokrasi Gotong Royong*. Gagasan-gagasan Soekarno dalam demokrasi ini sering dikenal dengan “Demokrasi Gotong Royong”, dalam pidatonya didepan anggota BPUPK tanggal 1 Juni 1945, pidato ini dikenal dengan “Pidato Lahirnya Pancasila”. Dalam penegasanya bahwa agar negara indonesia bukan negara sekuler bukan pula negara agama, akan tetapi negara pancasila. Dalam pidatonya Soekarno menyampaikan *Philosophische Grondslag*:

- a. *Kebangsaan Indonesia*

Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat satu”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya-tetapi “semua buat semua”. Dan menurut Soekarno dasar yang baik dijadikan sebagai dasar pertama adalah dasar kebangsaan.

b. *Internasionalisme*

Kebangsaan bukan *Chauvinisme*, tapi persatuan dunia, persaudaraan dunia. Indonesia bukan hanya menginginkan negara merdeka, akan tetapi membangun solidaritas antar bangsa, kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. *Mufakat dan Demokrasi*

Ini adalah dasar permufakatan, keterwakilan, dan permusyawaratan. Demikain menerangkan bahwa ketika terjadi kemuskilan dalam pengambilan kebijakan didalam kenegaraan perlu adanya musyawarah bersama.

d. *Kesejahteraan Sosial*

Dalam pandangan Soekarno demokrasi barat berasaskan kapitalisme dan berdampak ketimpangan, watak dasar kapitalistik menjadikan demokrasi barat tidak relevan untuk bangsa Indonesia. Sebab demokrasi yang diinginkan bangsa indonesia adalah demokrasi kerakyatan, demokrasi yang memberikan penghidupan *Politiek Economische Democratie*. Soekarno juga menambahkan bahwa prinsip dari Pancasila harus mengandung unsur *Sociale Rechtoaardigheid* yaitu bukan hanya persamaan hak politik akan tetapi persamaan ekonomi, yang bermakna kesejahteraan bersama.

e. *Ketuhanan yang Maha Esa*

Ketuhanan yang berkebudayaan, dimana nilai-nilai agama tetap akan kita lestarikan dan selaraskan dalam kebudayaan bangsa indonesia. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, dan toleransi.¹⁹

Panitia Sembilan

Selanjutnya perumusan dasar negara dan perjalanan panjang pancasila harus dibahas oleh sembilan orang Indonesia pilihan, diantaranya adalah : Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, A.A Maramis, Abdul Kahar Moezakkir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.H. Agus Salim.

Panitia Sembilan adalah pelebaran dari BPUPK dan PPK, atas inisiatif genuine Soekarno untuk membentuk kepanitiaan yang utuh demi merumuskan dasar negara dan *Lietstar*, yang akan memandu bangkitnya dan arah perjuangan kemerdekaan bangsa.

¹⁹*ibid*, h. 16.

Beberapa ideologi yang sempat muncul dalam perbincangan BPUPK adalah pandangan tentang Nasionalisme, Sekularisme dan Negara Agama. Panitia sembilan bertugas membuat UU. Tugas pembuatan UU bukanlah hal yang sepele, sebab panitia ini bertugas mengakomodir segala kepentingan dan pemahaman utuh dari semua anggota panitis, terlebih dari seluruh bangsa, suku dan agama yang hendak di wadahi dalam negara.

Sebab pentingnya sebuah Dasar Negara Mohammad Natsir mengutarakan bahwa “ UUD itu haruslah berurat dan berakar dalam alam pikiran, alam perasaan, dan alam kepercayaan serta falsafah hidup dari rakyat dalam negara kita”. Ungkapan Natsir lainnya adalah “Dasar Negara adalah yang dapat menyusun hidup sehari-hari bagi rakyat, baik secara perorangan maupun secara kolektif”

Setidaknya ada tiga faham kenegaraan yang muncul dan mengerucut dalam perbincangan dasar-dasar negara yang dibahas ;

1. Islam

Sebagaimana uraian di atas bahwa Islam adalah bagian penting dalam upaya pembangkitan semangat dan berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. maka islam adalah bagian dari faham yang muncul dan dimunculkan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Secara pengertian Islam adalah agama yang menunjukkan jalan keselamatan, tatanan nilai yang mengarahkan, menunjukkan nilai untuk mengatur manusia menjadi manusia hakiki.

Anggota BPUPK dan sekaligus Panitia Sembilan yang mengusung islam sebagai dasar negara menyatakan kelayakan islam sebagai dasar negara, meski mereka menyadari bukan hanya islam-lah yang berjuang atas indonesia. Muncul kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam sebagai pemeluk-pemeluknya”, adalah cerminan keinginan memasukan nilai Islam sebagai dasar Negara meski dikemudian hari kalimat tersebut digantikan dengan Ketuhahnan yang Maha Esa.

Penghapusan *tujuh kata* dari isi Pancasila melalui perdebatan panjang dan menjadi modal kaum konservativ untuk menyerang Soekarno, bahkan membuat beberapa gerakan untuk menjatuhkan Soekarno. Wahid Hasyim ayahanda Gus Dur berkeyakinan dan menyetujui penghapusan *tujuh kata* tersebut dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menumbuhkan *sektarianisme* dalam perpolitikan nasional.²⁰

2. Nasionalisme

Pengertian “nasionalisme” di sini memang harus diberi kualifikasi “modern”, bahkan untuk Indonesia diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab nasionalisme “kuno”, seperti banyak dikhawatirkan orang, adalah ekstensi paham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Sebaliknya, nasionalisme modern adalah *paham tentang hak bagi suatu*

²⁰Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Cet. VIII, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2008), h. 79

bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, dan karena itu, anti-imperialisme, jadi konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern akan melahirkan kestabilan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah-pisah. Karena itu nasionalisme merupakan unsur esensial bagi pembangunan bangsa (*nation building*) untuk Indonesia, sebuah bangsa dan negara yang fragmentasi etnis dan kesukuan ataupun unsur-unsur perbedaan sosial-kultural selalu merupakan ancaman bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi.²¹

Ide Nasionalisme ini digelontorkan oleh golongan nasionalis, seperti Soekarno dan Hatta, dan juga mendapatkan perlawanan argumen dari anggota Panitia Sembilan. Oleh sebab itu Soekarno menyatakan bahwa Nasionalisme Indonesia bukanlah Nasionalisme barat dan Nasionalisme Sekular, akan tetapi Nasionalisme Indonesia. Opsi yang ditawarkan Soekarno, mulai dari pancasila hingga dasar negara pun didasari oleh pemahaman tentang latar belakang masyarakat Indonesia. Soekarno pernah menulis, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme.

3. Sekularisme

Sekularisme adalah suatu paham yang tertutup, suatu sistem ideologi tersendiri dan lepas dari agama. Inti sekularisme ialah penolakan adanya kehidupan lain di luar kehidupan duniawi ini.²² ini artinya memisahkan agama dan negara sama sekali. Maka dalam tataran nilai agama bukanlah bagian dari penentu nilai dan norma akan tetapi agama adalah bangunan masyarakat dan menjadi hak private bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pancasila :*Satu*: Ketuhanan Yang Maha Esa,*Dua*: Kemanusiaan yang adil dan beradab, *Tiga*: Persatuan Indonesia, *Empat* : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, *Lima* : Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Demikianlah isi dari pancasila yang hari ini kita yakini dan kita upayakan sekuat tenaga untuk tetap menjadi dasar Negara, Nafas hidup Bangsa Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, bukan Dasar Negara yang sekuler, akan tetapi Pancasila adalah Dasar Negara yang berkebudayaan. Hal ini bermakna bahwa di dalam Pancasila ada Islam dengan segala nilainya dan tetap mempertahankan dan menyuburkan Kebudayaan-kebudayaan ke Indonesiaan.

Islam adalah satu Agama yang hidup dalam sebagian besar Rakyat Indonesia, Islam juga Idiologidan Islam bukan semata-mata Agama yang melulu

²¹Nurcholis Madjid. *Indonesia Kita*. <http://nurcholishmadjid.org/buku/> . diakses 2 Maret 2018

²²-----, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. <http://nurcholishmadjid.org/buku/>. diakses 2 Maret 2018

tentang Hubungan Manusia dengan Tuhan akan tetapi juga mengatur Hubungan sesama Manusia. Dalam hal kenegaraan Islam juga sepenuhnya mendukung adanya sebuah Persatuan dan Persatuan yang dinamis dalam kerangka menjalankan Hukum Negara. 22 Oktober 1945 KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan Fatwa bahwa "*membela Negara adalah Fardhu Ain*", sebagai Tokoh Agama yang mumpuni dalam Bidang keilmuan Islam beliau menyampaikan fatwa tersebut dengan sadar bahwa Negara membutuhkan pengorbanan Rakyatnya untuk tetap tegak berdiri dan terus melangsungkan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Ketika Islam ada didalam Pancasila atau Pancasila ada di dalam Islam ini bermakna bahwa Islam memelihara Nilai yang sudah tumbuh dalam sanubari dan urat nadi Bangsa Indonesia dan akan menumbuhkan serta menjaga Nilai-nilai yang akan lahir dan berkembang dalam Bangsa Indonesia.

Awal mula ditetapkan Pancasila dalam Sidang BPUPK dari Inisiatif Panitia Sembilan yang hari ini kita kenal dengan "*Piagam Jakarta*" *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya* " dan kemudian hari ini kita kenal dengan sebutan pembukaan UUD 1945 di ubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah kekalahan Islam dan Tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan sebagai Idialisme tetapi ini adalah kemenangan sejati Islam untuk mewujudkan Negara yang Dinamis dan berkebudayaan

Islam yang menjadi ruh Pancasila bukan hanya tercermin dalam sila pertama, batang tubuh UUD 1945, pembukaan UUD 1945 akan tetapi Islam menjadi ruh dalam seluruh nilai, norma, dan hukum yang ada di Indonesia. Sebab keyakinan Islam dan Ajaran Islam memberikan kontribusi dalam proses bermasyarakat dan berdampak dalam aspek-aspek kehidupan Masyarakat Indonesia.

Sila Ketuhanan yang Maha Esa menghendaki nilai ketuhanan yang positif yang digali dari Islam yang Profetik, membebaskan dan memuliakan keadilan dan persaudaraan dan juga ketuhanan yang toleran yang mendorong semangat bergotong royong mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam generasi milinial yang akses informasinya bebas, cepat dan tanpa batas diharapkan Pancasila mampu dan dijadikan prinsip dalam membatasi dan menanamkan nilai-nilai toleransi yang terus tergerus oleh kepentingan yang ingin merong-rong luhurnya Pancasila sebagai dasar Negara.

Maka menjadi sebuah keharusan bagi setiap kalangan baik unsur Pemerintahan, Akademisi, Praktisi hukum, pendidik memberikan pemahaman serta meng-internalisasi nilai Pancasila dan Islam yang berkebudayaan.

Dimulai dari memahami Islam sebagai agama universal dan *rahmatan lil 'alamin* memahami Pancasila sebagai satu kesatuan utuh dan bentuk implementasi Islam yang berkebudayaan, bukan menjadikan keduanya bagian yang *head to head*. Sebagaimana pesan sang guru bangsa

Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. orang tidak dapat berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. diantara keduanya terjadi tumpah tindih sekaligus perbedaan-perbedaan.²³

Generasi muda milenial, kalangan santri, akademisi, pekerja, petani yang merasa memiliki seutuhnya Pancasila dan menghargai jasa besar bangsanya sudah seharusnya bersama menjadikan dirinya bagian dari gerakan “Pancasila” sebagai misi dan *welstanhoung* dalam kehidupan.

Referensi

- Ali Engineer, Asghar. *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Atjeh, H Aboebakar. *Sejarah Hidup KH. A Wahid Hasjim*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. LkiS Pelangi Aksara. Yogyakarta. Cet. VIII. 2008.
- Bustami, Abdul Latif. *Resolusi Jihad: Perjuangan Ulama: dari menegakan Agama Hingga Negara*. Jombang: Pustaka Tebuireng. 2015.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas* Jakarta: PT.Gramedia, 2017.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. <http://nurcholishmadjid.org/buku/>
- Madjid, Nurcholis. *Indonesia Kita*. <http://nurcholishmadjid.org/buku/>
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Malaka, Tan. *Merdeka 100%*. Tangerang: Margin Kiri, 2005
- Naim, Ngainun. “Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid”. Dalam *Jurnal Episteme*, Vol 10. No 2, 2015.
- Natsir, Mohammad. *Islam sebagai dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy, 2014
- Soekarno. *Dibawah Bendera Revolusi*. Didapatkan dari book pdf. Akses pada 23 Maret 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara Agama Dan Kebudayaan*. Desantara. Depok . 2001.
- Wahid, Salahudin. *Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman*. Pustaka Tebuireng. Jombang. 2018.
- <http://news.liputan6.com/read/2969876/jokowi-saya-indonesia-saya-pancasila>

²³Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara Agama Dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), h. 117